PANEN RAYA PADI SERENTAK DI 14 PROVINSI

Kulonprogo Sentra Benih Padi dan Lumbung Pangan

PENGASIH (KR) - Panen Raya Padi Serentak di 14 provinsi dan di DIY terpusat di Bulak Karangasem, Padukuhan Ngramang, Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo, Senin (7/4) menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.

KR-Asrul Sani

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X dan Bupati Kulonprogo Agung Setyawan (tengah) panen raya di Bulak Karangasem.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam arahannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petani di seluruh Indonesia. "Terimakasih semua unsur petani di seluruh Indonesia, perjuanganmu sangat mulia, tanpa adannya pangan tidak akan mungkin sebuah Negara ada, untuk itu lumbung pangan sangat penting untuk dijaga dan ditingkatkan," kata Prabowo yang dalam panen tersebut juga berlangsung secara *daring*.

Presiden menekankan pentingnya sinergi antara petani, pemerintah dan pihak terkait untuk terus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

"Semua unsur pimpinan wajib mencari jalan supaya prosedur memudahkan petani, sehingga para petani kita dapat memproduksi dengan baik, penghasilan baik, hidup makmur bahagia aman dan sejahtera," jelas Prabowo.

Sementara itui Gubernur DIY Sri Sultan HB X berterima kasih pada Presiden atas kebijakannya sehingga memudahkan para petani dalam menjual hasil panennya. "Terima kasih Bapak Presiden dengan harga Rp 6.500 perkilogram jelas petani sangat diuntungkan," ujar Sultan. Sri Sultan berharap dengan adanya kebijakan ini semangat para petani meningkat dan bermunculan petani milenial.

Sultan menyarankan petani di Kulonprogo mendaftarkan sawah miliknya sebagai lahan abadi. "Dengan demikian, Pemda DIY bisa menanggung jika petani mengalami kerugian saat penanaman," katanya.

Pihaknya mengingatkan, lahan yang sudah terdaftar tidak boleh jual. Kalau mau dijual, maka petani harus melapor ke pemerintah kabupaten agar segera disediakan lahan penggantinya.

Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan mengatakan, panen raya padi serentak bisa menjadi momentum untuk mengangkat kembali keunggulan sektor pertanian di wilayah kabupaten ini. "Kulonprogo siap kembali menjadi sentra penyedia benih bagi DIY dan Jawa Tengah serta lumbung pangan DIY," tegasnya.

Dulu katanya, Kulonprogo terkenal sebagai sentra benih padi DIY. Tapi seiring waktu, status tersebut mulai tenggelam karena jumlah penangkar benih padi terus berkurang. Agung akan menggelar pelatihan taruna tani demi menghidupkan kembali status sebagai lumbung pangan dan sentra benih. Pelatihan tersebut dilakukan secara periodik, dengan 50 peserta perangkatan. "Kami juga akan mengaktifkan lagi 17 penangkar benih padi di Kulonprogo," tuturnya.

Agung menilai cara tersebut juga bisa menjadi upaya menciptakan regenerasi petani. Sekaligus mengubah citra pertanian menjadi lebih baik di generasi muda, khususnya karena mampu memberikan kesejahteraan.

Upaya lain yang menurutnya perlu dilakukan adalah optimalisasi alat mesin pertanian (alsintan). Optimalisasi tersebut juga perlu menyesuaikan dengan kondisi lahan pertanian di Kulonprogo.

"Karena lahan yang dimiliki tiap petani di Kulonprogo luasnya tidak lebih dari 500 meter persegi, sehingga perlu alsintan yang sesuai dengan kondisi tersebut," ujar Agung.

Pihaknya berharap berbagai upaya tersebut bisa mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan di Kulonprogo. Bahkan hasil produksi surplus sehingga bisa disalurkan ke daerah lain.

(Rul)

KR-Istimewa

ANTISIPASI LAKA LAUT: Sebagai upaya mengantisipasi agar para pengunjung atau wisatawan tidak mengalami kecelakaan laut (laka laut) maka petugas Satlinmas Rescue Istimewa (SRI) Wilayah V Kulonprogo memasang tanda peringatan di sejumlah titik rawan laka laut. Dengan peringatan tersebut para wisatawan diharapkan lebih berhati-hati selama berlibur di kawasan pantai selatan Kabupaten Kulonprogo.

Bulog Beli Gabah Petani Rp 6.500/Kg

PENGASIH (KR) - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akhirnya membeli gabah kering hasil panen. Langkah tersebut disambut gembira para petani, apalagi harganya sesuai ketetapan pemerintah Rp 6.500 perkilogram atau lebih tinggi dari harga jual di tingkat tengkulak.

Ketua Kelompok Tani Dadi Arum Sari Pedukuhan Ngaramang, Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Wiwit Suroto mengungkapkan, baru tahun ini Bulog betul-betul turun ke sini. Selama ini kami menjual harganya sangat rendah dan hanya di penggilingan, belum melibatkan Bulog," katanya di sela panen raya padi serentak di Bulak Karangasem, Pedukuhan Ngramang, Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Senin (7/4).

Panen raya dipimpin Gubernur DIY, Sri Sultan HB X dan dihadiri para pejabat lingkungan DIY termasuk Bupati Kulonprogo Agung Setyawan, Wabup Ambar Purwoko serta Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifudin.

Sebelumnya, gabah panenan petani dihargai kisaran Rp 5.000 perkg oleh tengkulak maupun tempat penggilingan. Dengan harga Rp 6.500 perkg maka pihaknya mendapat harga yang lebih tinggi sesuai standard yang ditetapkan Bulog yakni Rp 6.500 perkg. "Kalau kemarin kemarin, harganya masih di kisaran Rp 5000 - 5.200 perkg. Sedangkan Bulog Rp 6.500 perkg, jadi bagus *banget*," ujarnya menambahkan petani sudah bisa balik modal dengan harga jual gabah sebelumnya.

(Rul)

KR-Asrul Sani

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil DIY, Ninik Setyowati (empat kanan) dan Bupati Agung Setyawan (kanan) berdialog dengan petani di Bulak Karangasem.

PRODUKSI GULA SEMUT 1.000 TON LEBIH

Sempat Terhenti Saat Covid-19

KOKAP (KR) - Gula semut dari Kapanewon Kokap sudah lama menjadi komoditas ekspor. Tapi saat pandemi Covid-19 lalu, ekspornya berhenti total. Padahal sebelum pandemi produksi gula semut dari Kokap mencapai kapasitas 1.680 ton. Tapi karena terjadi pandemi maka ekspor terhenti dan produksinya juga anjlok.

"Pascapandemi, ekspor gula semut dari Kokap kembali hidup meski masih tersendat. Sebab saat itu ekspor menumpang lewat Kabupaten Bantul, dengan rata-rata kapasitas 50 ton dalam sepekan," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kulonprogo, Drajat Purbadi belum lama ini.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo telah melakukan pelepasan 22 ton gula semut di Kalurahan Hargorejo, Kapanewon Kokap. Produk gula semut dari Hargorejo dilepas untuk ekspor ke pasar Asia hingga Amerika. Gula semut tersebut dibuat warga setempat yang ikut mengelola sebuah koperasi.

"Pelepasan ini merupakan ekspor perdana langsung dari Kulonprogo sejak terhenti karena pandemi," jelasnya.

Drajat meyakini potensi produksi gula semut di Kulonprogo bisa melampaui produksi terakhir sebelum pandemi. Tapi masih ada sejumlah permasalahan yang perlu ditangani agar produksi bisa optimal. Seperti proses panen cukup rumit dan berbahaya, karena air nira harus didapatkan dengan memanjat pohon kelapa yang tinggi. Warga yang *nderes* (mengambil air nira dari pucuk pohon kelapa) hanya menggunakan alat tradisional dan seadanya. "Kondisi tersebut juga membuat regenerasi petani nira sulit, selain itu kualitas gula semut juga perlu distandarkan," tegasnya.

Drajat mengungkapkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar proses panen nira kelapa lebih mudah. Termasuk memberikan 1.200 bibit Kelapa Genjah, yang pohonnya tidak terlalu tinggi tapi mampu menghasilkan air nira dengan kualitas sama.

Selain itu perlu ada pengembangan produksi gula semut di sektor hilir, seperti inovasi pengolahan produk serta pemasaran berbasis teknologi. Cara tersebut diyakini akan membuat nilai jual gula semut menjadi lebih tinggi. "Dengan adanya nilai tambah pada gula semut tentu akan menarik petani muda untuk ikut terlibat," tuturnya.

(Rul)

PERLU ADA KAJIAN PERUBAHAN

Sistem Zonasi dan Pelaksanaan UN

WATES (KR) - Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo, Nur Wahyudi mengaku belum mengetahui kebijakan pemerintah pusat mengenai skema pendidikan yang baru.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) akan diganti dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Salah satu jalur penerimaan, zonasi diubah.

"Kami belum mengetahui soal kebijakan baru tersebut. Belum ada edaran resmi. Tapi kalau itu sudah menjadi arahan pusat, tentu secara prinsip kami di daerah akan melaksanakannya," kata Nur Wahyudi, belum lama ini.

Pihaknya menilai kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof Abdul Mu'ti tersebut, perlu ada kajian mendalam, baik skema pelaksanaan PPDB yang nanti menjadi SPMB dan UN. Nur Wahyudi mengaku juga perlu berdiskusi dengan Dinas Pendidikan di kabupaten/ kota di DIY.

Berdasarkan informasi PPDB diganti. Pada sistem baru, penerimaan tidak lagi melihat jarak sekolah dengan alamat di dokumen kependudukan. Tapi melihat jarak sekolah dengan rumah tinggal calon pelajar. UN yang sebelumnya dihapus akan diberlakukan lagi untuk semua jenjang, SD sampai SMA/sederajat.

Pelaksanaannya bertahap, diawali jenjang SMA/ sederajat mulai November 2025, menyusul SD dan SMP mulai 2026.

Lebih lanjut Nur Wahyudi menjelaskan, selama ini pelaksanaan arahan dari pusat menyesuaikan kondisi di daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan mengatur penerapan arahan sesuai kondisi masing-masing.

"Biasanya ada komunikasi dengan kabupaten/kota lainnya agar ada persamaan persepsi," tuturnya menambahkan kajian juga diperlukan untuk pelaksanaan UN. Apalagi di DIY sudah ada Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD), sudah setara UN.

(Rul)